

ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA PROYEK CWU PEMBANGUNAN RSPTN, IRC, DAN WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG OLEH PT NINDYA KARYA

Oleh

I NENGAH ADITYA PRAYOGA

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah jenis pajak yang dikenakan atas pengalihan modal atas pendapatan tertentu seperti jasa yaitu jasa teknik, jasa konsultasi dan jasa manajemen serta jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015. Penghasilan dari sewa kecuali sewa atas tanah dan bangunan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2. Tujuan dari Penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 yang diterapkan PT Nindya Karya terhadap proyek Contract Work Unit (CWU) pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN), Integrated Research Center (IRC) atau Badan Pusat Riset dan Penelitian Terpadu, dan Wastewater Treatment Plant (WWTP) atau Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Universitas Lampung. Penulisan ini menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terkait pemotongan PPh Pasal 23 di PT Nindya Karya. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa PT Nindya Karya telah menerapkan pemotongan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Pemotongan dilakukan dengan tarif 2% bagi Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tarif 4% bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, bukti pemotongan pajak telah diterbitkan secara sah dan didokumentasikan dengan benar. PT Nindya Karya telah menerapkan mekanisme pemotongan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Pemotongan Pajak, PT Nindya Karya

ABSTRACT

WITHHOLDING MECHANISM OF INCOME TAX ARTICLE 23 IN THE CWU PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF RSPTN, IRC, AND WWTP OF THE UNIVERSITY OF LAMPUNG BY PT NINDYA KARYA

By

I NENGAH ADITYA PRAYOGA

Income Tax Article 23 or Income Tax Article 23 is a type of tax imposed on the transfer of capital on certain deposits such as services, namely engineering services, consulting services and management services as well as other services regulated in the Minister of Finance Regulation 141/PMK.03/2015. Income from rent except for leases on land and buildings described in Law No. 36 of 2008 Article 4 Paragraph 2. The purpose of this paper is to find out how the mechanism for withholding Income Tax Article 23 applied by PT Nindya Karya to the Contract Work Unit (CWU) project for the construction of the State University Hospital (RSPTN), Integrated Research Center (IRC) or the Central Agency for Integrated Research, and Wastewater Treatment Plant (WWTP) or the Limbah Wastewater Disposal Agency (IPAL) at the University of Lampung. This writing uses data collection through interviews and documentation related to withholding Income Tax Article 23 at PT Nindya Karya. The results of this writing show that PT Nindya Karya has implemented deductions in accordance with applicable regulations, namely Law Number 36 of 2008 and Minister of Finance Regulation Number 141/PMK.03/2015. The deduction is carried out at a rate of 2% for Taxpayers who have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and a rate of 4% for Taxpayers who do not have a Taxpayer Identification Number (NPWP). In addition, proof of tax withholding has been issued legally and properly documented. PT Nindya Karya has implemented a deduction mechanism in accordance with the provisions.

Keywords: *Income Tax Article 23, Tax Withholding, PT Nindya Karya*